

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

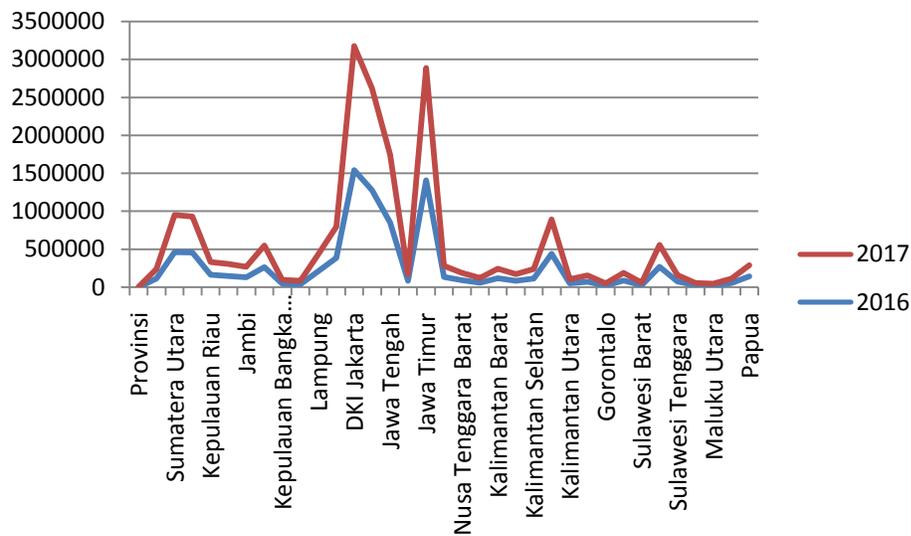
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis pembangunan ekonomi pada suatu negara (Mankiw, Quah, & Wilson, 2014). Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian menambah pendapatan masyarakat pada satu periode tertentu. Untuk memperoleh kesejahteraan hidup masyarakat, maka pelaksanaan pembangunan harus dilakukan sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pembangunan ekonomi tak pernah lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), karena pembangunan ekonomi mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya pertumbuhan ekonomi akan memperlancar proses pembangunan ekonomi (Pridayanti, 2013). Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang akan diproduksi oleh masyarakat mengalami peningkatan (Sukirno, 2015).

Pembangunan ekonomi pada negara berkembang, seperti Indonesia bertujuan untuk pemerataan pembangunan ekonomi dan hasilnya kepada seluruh masyarakat, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, mengurangi perbedaan kemampuan antar daerah, struktur perekonomian yang seimbang (Hapsari, Hakim, & Soeaidy, 2014).

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan perkembangan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk di suatu negara. Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang di dalamnya terlihat jelas keadaan makro ekonomi suatu negara dengan pertumbuhan ekonominya, *income* per kapita dan berbagai instrumen ekonomi lainnya. Angka PDB sangat diperlukan karena selain untuk bahan analisa perencanaan pembangunan juga merupakan barometer untuk mengukur hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan (Dewi & Sutrisna, 2015).

Grafik 1.1. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menurut Provinsi tahun 2016 – 2017



Sumber : Badan Pusat Statistik 2018

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dijelaskan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) di Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai PDB yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lain karena perputaran uang dan perkembangan industri lebih banyak di pulau jawa khususnya di daerah ibu kota Indonesia, yaitu DKI Jakarta. Seiring itu, provinsi Jawa timur juga memiliki nilai PDB yang tidak

jauh berbeda dengan provinsi DKI Jakarta. Kemudian dilanjutkan oleh Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat yang memiliki nilai PDB yang tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabil dapat memberikan dampak positif baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pemerintah di masing-masing negara. Ada beberapa komponen kebijakan yang bisa digunakan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai (Primandari, 2017). Salah satu adalah melalui kebijakan defisit fiskal. Defisit fiskal (*deficit budget*) merupakan kelebihan belanja pemerintah dibandingkan dengan pendapatan pemerintah. Pada rezim orde baru, kebijakan APBN menganut sistem berimbang (*balanced budget*), namun utang luar negeri dimasukkan sebagai penerimaan. Sejak tahun anggaran 1999/2000, kebijakan APBN menganut sistem defisit (*deficit budget*) yang biasanya diterapkan sekian persen dari PDB (Adiningsih, 2008).

Menurut Keynesian, defisit anggaran akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta konsumsi. Defisit anggaran yang dibiayai utang, yang berarti beban pajak pada masa sekarang relatif menjadi ringan, akan menyebabkan peningkatan pendapatan yang siap dibelanjakan, akan meningkatkan konsumsi dan sisi permintaan secara keseluruhan. Jika perekonomian belum dalam kondisi kesempatan penuh, peningkatan sisi permintaan akan mendorong produksi dan selanjutnya peningkatan pendapatan nasional. Defisit Fiskal dapat membahayakan stabilitas ekonomi makro, karena dapat meningkatkan rasio utang sehingga meningkatkan beban utang pemerintah dan menurunkan investasi yang produktif.

Peningkatan jumlah obligasi yang dikeluarkan untuk menutupi defisit fiskal dan menciptakan *crowding-out effect*, yaitu penurunan investasi swasta yang produktif, sehingga membahayakan kelangsungan pertumbuhan ekonomi (Rumere, 2017).

Untuk menutup defisit anggaran tersebut pemerintah mengupayakan program pembiayaan, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Pembiayaan dalam negeri dapat bersumber dari penciptaan uang, penjualan obligasi pemerintah, maupun misalnya melakukan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan penjualan aset program restrukturisasi perbankan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Sumber pembiayaan luar negeri dapat bersumber dari pinjaman luar negeri maupun penjualan obligasi di luar negeri (Adiningsih, 2008).

Sumber penerimaan pemerintah tidak hanya bersumber dari pajak dalam negeri tetapi juga bersumber dari pajak perdagangan luar negeri. Pajak perdagangan internasional terutama kebijakan tarif bea masuk dan bea keluar meningkat seiring dengan meningkatnya nilai ekspor dan impor dalam perdagangan. Peraturan menteri keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk atau bea keluar mengacu pada UU No. 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Pemerintah menetapkan bea masuk sebesar yang telah ditentukan untuk melindungi produk lokal terhadap persaingan produk impor. Sedangkan untuk bea keluar sebagai contoh, ketika harga minyak goreng dalam negeri naik karena maraknya ekspor CPO ke luar negeri maka pemerintah menerapkan bea keluar CPO (Kemenkeu, 2018).

Perdagangan internasional merupakan penghubung antara perekonomian dalam negeri dengan perekonomian luar negeri. Hubungan ini terjadi karena pada kenyataannya bahwa setiap negara yang ada sangat saling membutuhkan antar negara

satu dengan negara lainnya. Hasil produksi dari suatu negara diekspor ke negara lain, kemudian beberapa barang konsumsi dan bahan baku pada suatu negara diimpor dari negara lain yang menghasilkan barang tersebut. Hubungan ekspor impor tersebut menyebabkan terciptanya hubungan yang saling ketergantungan antara kedua negara dalam perekonomian. Aktivitas perdagangan internasional seperti adanya ekspor dan impor bisa menciptakan mesin penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Peningkatan ekspor akan berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi karena ekspor dapat menambah cadangan devisa Indonesia, memperluas pasar dan memperluas lapangan pekerjaan (Sukirno, 2015).

Tidak hanya ekspor dan impor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi pertumbuhan UMKM di Indonesia juga memainkan peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. UMKM merupakan kegiatan usaha yang memiliki kesempatan usaha yang luas karena berada di berbagai sektor ekonomi baik pertanian maupun non pertanian dan bertujuan untuk meningkatkan investasi, penyerapan jumlah tenaga kerja, pengurangan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan dan pembangunan ekonomi (Sudiyarti, Ismawati, & Irwansyah, 2017).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan faktor penting dalam proses pertumbuhan ekonomi, dimana UMKM itu sendiri lebih bersifat kepada sektor riil dan berada di berbagai macam sektor moneter, sehingga masyarakat lebih merasakan manfaatnya secara langsung yang berimbas kepada meningkatnya pendapatan masyarakat, karena semakin banyak jumlah UMKM yang tersebar maka semakin banyak tenaga kerja yang terserap berarti semakin banyak faktor produksi

tenaga kerja sehingga memungkinkan bagi perekonomian tersebut untuk berproduksi lebih maksimal (Subandi, 2012).

UMKM tahan terhadap krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 karena UMKM tidak memiliki utang luar negeri. Sektor UMKM yang berorientasi ekspor memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan PDB sehingga mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang baik (Kuncoro, 2014).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik membahas masalah ini melalui penelitian yang penulis tuangkan dalam judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Defisit Fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ?
2. Apakah Ekspor berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ?
3. Apakah Impor berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ?
4. Apakah Jumlah UMKM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh bukti empiris seberapa besar pengaruh Defisit Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
2. Untuk memperoleh bukti empiris seberapa besar pengaruh Ekspor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
3. Untuk memperoleh bukti empiris seberapa besar pengaruh Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
4. Untuk memperoleh bukti empiris seberapa besar pengaruh Jumlah UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan latihan pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai kajian bagi peneliti lainnya agar dapat memberikan kontribusi yang positif bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan pemerintah dalam pertimbangan perencanaan strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.